

PENERTIBAN PKL DI SURABAYA

**(Studi Deskriptif Tentang Implementasi Kebijakan
Penertiban PKL di Surabaya Bulan Februari 2002)**

SKRIPSI



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**Oleh :
Bismo Ari Sulistyio
NIM. 079815738**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2004**

Telah diujikan dan disahkan pada

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Juni 2004

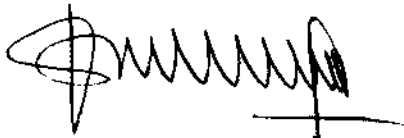
Ruang : 220

Ketua Penguji



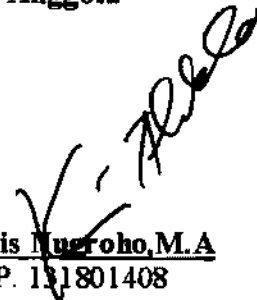
Dra Siti Aminah, M.A
NIP. 131836624

Anggota



Drs Budi Prasetyo, M.Si
NIP. 131918696

Anggota



Drs Kris Nugroho, M.A
NIP. 131801408

BAB IV

KESIMPULAN

Strategi yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk melaksanakan Operasi Penertiban Terpadu di bulan Februari 2002 meliputi penyediaan sarana dan prasarana, bantuan dukungan dari berbagai instansi, penambahan dana operasional serta penyusunan program-program dan tujuan-tujuan kebijakan. Pelaksanaan operasi penertiban terpadu dimulai 2 Februari 2002 dan berakhir 28 Februari 2002. Sasaran penertiban meliputi 3 wilayah Surabaya, yaitu Surabaya Timur, Utara dan Selatan. Hasil penertiban adalah sebanyak 53.058 PKL membongkar sendiri dagangannya dan 103.993 pedagang ditertibkan oleh Pemkot, dengan kata lain dibongkar dan disita oleh Pemkot Surabaya. Alasan yang digunakan untuk menertibkan PKL adalah PKL mengganggu keindahan kota, penyebab kemacetan, penyebab kekotoran dan kekumuhan, sedangkan Pemkot Surabaya tidak ingin citra kotanya kotor sehingga PKL dituding sebagai penyebab kekotoran tersebut. Maka PKL perlu ditertibkan agar wajah kota tidak rusak oleh keberadaan PKL. PKL sebagai *target group* kebijakan ini menolak penertiban ini, penolakan dapat dilihat ketika pelarangan berjualan atau jam buka maupun relokasi tempat ditolak oleh PKL. Penolakan tersebut dikarenakan kepentingan PKL tidak tersentuh oleh kebijakan tersebut. Kebijakan dibuat dengan tidak melibatkan PKL itu sendiri, sehingga kebijakan yang dikeluarkan bersifat elitis dan konsekuensinya PKL menolak kebijakan tersebut.

Dalam penertiban ini, pihak-pihak yang berkepentingan adalah Pemkot Surabaya yaitu Dispol PP sebagai pelaksana, Walikota Surabaya yang baru diangkat Bambang DH,

PD Pasar Surya, Oknum atau preman yang mengambil keuntungan dari penertiban serta PKL sebagai *target group* kebijakan. Bambang DH sebagai walikota Surabaya yang baru diangkat berkepentingan menunjukkan legitimasinya dengan mengeluarkan suatu kebijakan yang besar. Maka dipilihlah isu PKL yang mengotori kota, kemudian menunjuk Dispol PP sebagai pelaksana penertiban. Dispol PP yang paham posisi walikota baru yang membutuhkan legitimasi kemudian menyusun kebijakan penertiban dan meminta dana tambahan sebesar 1,3 miliar untuk dana operasional penertiban. Jumlah PKL yang besar membuat ada pihak lain yang merasa bisa mengambil keuntungan jika penertiban berhasil dilakukan, yaitu PD Pasar Surya. PD Pasar Surya berharap penertiban ini berhasil merelokasi pedagang ke dalam pasar-pasar yang telah disediakan, sehingga dapat menaikkan PAD dari pasar. Ternyata PKL menolak direlokasi ke dalam pasar dengan alasan sepi dan membayar sewa, sehingga rencana relokasi tidak berjalan. Penyebab lain adalah beberapa PKL merasa ditarik pajak atau retribusi dari oknum pemkot atau preman setempat, sehingga merasa keberadaannya disahkan.

Pihak yang diuntungkan dalam penertiban adalah Bambang DH sebagai walikota baru yang mendapatkan legitimasi, kemudian Dispol PP yang mendapatkan tambahan dana sebesar 1,3 miliar dan oknum-oknum atau preman-preman tertentu yang menarik pajak pada PKL. Pihak yang dirugikan adalah PKL, karena kebijakan penertiban melarang PKL untuk berjualan. Dan PKL sendiri tidak punya kekuatan politis untuk menolak pelaksanaan kebijakan tersebut.